

**LAPORAN TRANSPARANSI  
PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG)  
BPR SURIYAH YOGYAKARTA  
TAHUN 2024**



**Jl. Magelang Km.6,3 Jombor Mlati Sleman  
TELEPON: (0274)868937**

## **PENJELASAN UMUM**

BPR SURIYAH YOGYAKARTA sebelumnya bernama BPR SINDU ADI. Pada tahun 2024 ini terjadi akuisisi dengan adanya perubahan pemilik beserta pemegang saham pengendali serta pergantian nama perusahaan dari yang sebelumnya bernama BPR SINDU ADI menjadi BPR SURIYAH YOGYAKARTA. Kelengkapan ataupun Proses penerapan Tata Kelola pada BPR SURIYAH YOGYAKARTA selama tahun 2024 sedang dalam penerapan ke arah tata kelola yang baik dan benar. Pada saat laporan ini dibuat, keadaan BPR Suriyah Yogyakarta masih adanya kekosongan pada beberapa Struktur - Infrastruktur Organisasi pada BPR. Hal tersebut akan segera dipenuhi di periode berikutnya demi mewujudkan tata kelola yang baik sesuai dengan POJK yang terbaru yang diterbitkan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan.

## LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

### A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) Atas Penerapan Tata Kelola

Nama BPR	BPR SURIYAH YOGYAKARTA
Alamat	Jl.Magelang Km.6,3 Jombor Mlati Sleman
Nomor Telepon	(0274)868937
Posisi Laporan	31 Desember 2024
Peringkat Komposit	4
Predikat Komposit	Kurang Baik
Kesimpulan / Penjelasan	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip tata kelola. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh pemegang saham dan manajemen BPR.

### B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

#### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Sudjut Budi Utomo
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau Jenjang organisasi.</li> <li>o Menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstem, hasil pengawasan dewan komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain.</li> <li>o Direksi wajib membentuk satuan kerja atau menunjuk pejabat dalam melaksanakan fungsi audit intern, manajemen risiko, dan kepatuhan.</li> <li>o Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, dengan adanya pemisahan tanggung jawab antara unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional.</li> <li>o Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</li> </ul>		

	o Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, dan rencana kerja lainnya.	
2.	Nama	: Aan Mardianasari Rochandi
	Jabatan	: Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan perundang- undangan lainnya dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati- hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan yang menyimpang dari peraturan.</li> <li>o Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.</li> <li>o Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain.</li> <li>o Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan OJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.</li> <li>o Meminimalkan risiko kepatuhan bank.</li> <li>o Melaporkan kepada anggota direksi lainnya dan dewan komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.</li> <li>o Melapor kepada dewan komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh direksi.</li> <li>o Tidak diperkenankan untuk membawahi fungsi bisnis dan audit intern.</li> <li>o Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis.</li> <li>o Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi.</li> <li>o Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.</li> <li>o Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait manajemen risiko.</li> <li>o Memastikan para pejabat eksekutif dan karyawan bank memahami dan mengimplementasikan manajemen risiko melalui berbagai media yang tersedia.</li> <li>o Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.</li> <li>o Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil BPR secara keseluruhan.</li> </ul>	
	Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :	
	-	
	Penjelasan Lebih Lanjut :	
	-	

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
-----	--

1.	Nama	:	Dadang Purwanta, SE, MM
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audt dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit eksternal dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan eksternal Institusi lainnya.		
Rekomendasi Kepada Direksi :			
-			
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Nihil			

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
BPR SURIYAH YOGYAKARTA tidak memiliki satuan Komite di BPR	

**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite**

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	BPR Suriah Yogyakarta tidak memiliki Komite pada BPR dikarenakan jumlah Asset BPR belum masuk kategori untuk wajib memiliki Komite pada BPR	

**c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite**

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
BPR Suriah Yogyakarta tidak memiliki Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite, dikarenakan BPR belum memiliki Komite dikarenakan jumlah Asset BPR belum masuk kategori untuk wajib memiliki Komite pada BPR			

## C. Kepemilikan Saham Direksi

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Sudjut Budi Utomo	Rp0	0%
2.	Aan Mardianasari Rochandi	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Para Direksi BPR SURIYAH YOGYAKARTA tidak memiliki kepemilikan saham pada BPR			

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Sudjut Budi Utomo	-	-	0%
2.	Aan Mardianasari Rochandi	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut:				
Para Direksi BPR SURIYAH YOGYAKARTA tidak memiliki kepemilikan saham pada perusahaan lain				

## D. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Sudjut Budi Utomo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Aan Mardianasari Rochandi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				

Para Direksi BPR SURIYAH YOGYAKARTA tidak memiliki Hubungan dalam hal Keuangan dengan BPR SURIYAH YOGYAKARTA

## 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Sudjut Budi Utomo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Aan Mardianasari Rochandi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Para Direksi BPR SURIYAH YOGYAKARTA tidak memiliki hubungan Kekeluargaan dengan BPR SURIYAH YOGYAKARTA				

## E. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Dadang Purwanta, SE, MM	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Komisaris di BPR SURIYAH YOGYAKARTA tidak memiliki kepemilikan Saham pada BPR SURIYAH YOGYAKARTA			

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Dadang Purwanta, SE, MM	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Komisaris BPR SURIYAH YOGYAKARTA tidak memiliki kepemilikan saham pada perusahaan lain.				

**F. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Dadang Purwanta, SE, MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Komisaris BPR SURIYAH YOGYAKARTA tidak memiliki hubungan Keuangan dengan BPR SURIYAH YOGYAKARTA				

**2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Dadang Purwanta, SE, MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Komisaris BPR SURIYAH YOGYAKARTA tidak memiliki hubungan kekeluargaan pada BPR SURIYAH YOGYAKARTA				

## G. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

### 1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp218.400.000	1	Rp57.300.000
2.	Tunjangan	0	Rp0	0	Rp0
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp218.400.000		Rp57.300.000
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Untuk Data gaji Direksi terdapat penjelasan dimana pada bulan Januari-Mei 2024 Jumlah Gaji yang dikeluarkan adalah untuk 1 Direksi saja ,dikarenakan pemenuhan jumlah kewajiban BPr untuk memiliki 2 Direksi baru terpenuhi di bulan Juni 2024.					

### 2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Tidak ada	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Saat ini tidak ada fasilitas tambahan yang diperoleh oleh Direksi dan Komisaris BPR Suriyah Yogyakarta			

## H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3.36 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.26 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.25 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1.68 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Untuk Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (a/b) seharusnya adalah 0:1 ataupun 1:1 terhadap gaji anggota Dean Komisaris. Hal ini terjadi karena saat ini tidak ada pembandingan gaji antar Komisaris di BPR Suriah Yogyakarta, dikarenakan jumlah Komisaris pada BPR Suriah Yogyakarta saat ini berjumlah 1 orang	

## I. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	02 April 2024	2	<p>1. Penurunan Kondisi CAR yang mencapai angka -11.57% menempatkan Pemegang saham pada posisi tidak memiliki kesanggupan untuk mengupayakan setoran modal, sehingga alternatif satu satunya untuk penyelamatan BPR adalah dengan adanya investor yang bersedia melakukan/ mengakuisisi BPR Sindu Adi.</p> <p>2. Adanya investor yang secara serius menindaklanjuti proses penyelamatan BPR Sindu Adi dan sudah melakukan due diligence serta</p>

			<p>analisis yang cukup cermat akhirnya disepakati bahwa misi penyelamatan BPR Sindu Adi di inisiasi oleh Ibu Sitti Fatimah, Bp.Mulia Budi Artha dan Bp Rezza Arief yang dibuktikan dengan melakukan setoran modal sebesar Rp 2.500.000.000 sebagai bukti keseriusan proses penyelamatan BPR Sindu Adi dihadapan Notaris Moh. Firdaus.</p> <p>3. Proses pengambil alihan yang memakan waktu cukup panjang, membuat kondisi operasional BPR Sindu Adi semakin terpuruk dikarenakan sanksi CDO sehingga BPR tidak ada aktivitas penerimaan dana dari pihak ketiga disisi lain biaya operasional tetap berjalan sehingga grafik kerugian semakin naik.</p> <p>4. Komisaris berpendapat bahwa moment penyelamatan BPR Sindu Adi ini harus menjadi moment perubahan internal dalam banyak hal untuk kemajuan BPR Sindu Adi</p> <p>5. Perlu dilakukan evaluasi atas prosedur kredit yang saat ini berjalan, apakah sudah sesuai dengan PKPB/SOP Lcredit, PE Kepatuhan dan SPI perlu melakukan evaluasi cermat atas proses yang ada. hal ini sangat diperlukan karena kelemahan yang paling menonjol di operasional BPR Sindu Adi adalah di bagian Kredit.</p> <p>6. Disarankan pula keada Direksi untuk semakin mengintensifkan koordinasai dengan seluruh jajaran untuk lebih bekerja keras dalam mengupayakan penyelesaian kredit bermasalah dan tetap optimal mengupayakan perbaikan NPL</p> <p>7. Pemenuhan struktur kelengkapan Pengurus BPR sangatlah mendesak untuk diupayakan agar BPR Sindu Adi dapat segera bangkit berlari menjelang pencabutan sanksi pembatasan wilayah kerja ( CDO ), serta agar secara optimal dapat memanfaatkan suntikan modal dari investor baru.</p>
2.	10 Juli 2024	8	<p>- Pada tanggal 2 Mei 2024 OJK menerbitkan pemberitahuan Persetujuan Izin Pengambilalihan BPR, sekaligus hasil PKK yang menyatakan berhasil LULUS sebagai Pemegang Saham Pengendali, yakni Ibu Sitti Fatimah dan Bp. Rezza Arif Budi Artha</p> <p>- OJK telah memberikan surat persetujuan pencairan deposito setoran modal RP 2.500.000.000 tepat pada akhir bulan Mei 2024</p>

			<p>(30-05-2024), Namun belum secara merta Deposito setoran modal dicairkan, karena belum terlaksananya RUPS penunjukan pengurus baru</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RUPS pengangkatan pengurus baru BPR Sindu Adi dilaksanakan pada tgl 03 Juni 2024 yang kemudaian ditindak lanjuti dengan jawabat Direksi sebelumnya (Dsr.Dissa Rihon Tobing) yang digantikan oleh Sdr.sudjut Budi Utomo sebagai Direksi dan Sdri.Aan Mardianasari sebagai Dir.Kepatuhan serta pengangkatan kembali Sdr. Dadang Purwanta sebagai Komisaris yang untuk sementara belum didampingi Komisaris Utama, dikarenakan calon Komisaris Utama yaitu Ibu Siti Chasanah saat ini tengah menjalanii ujian sertifikasi Komisaris.</li> <li>-Segera setelah terjadi pergantian pengurus BPR,pengurus baru bergerak cepat berkoordinasi dengan seluruh karyawan untuk menyusun stategi dan action plan sehubungan dengan adanya komitmen PSP untuk segera menambahkan setoran modal pada bulan agustus 2024 dan pencabutan sanksi CDO dimana artinya BPR Sindu Adi sudah diperbolehkan kembali melakukan Penghimpunan dan Penyaluran Dana seperti sediakala.</li> </ul>
3.	12 Agustus 2024	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Pemamparan penjelasan dari pengurus BPR Sindu Adi kepada PSP perihal perkembangan pada BPR Sindu Adi</li> <li>-PSP menegaskan terkait komitmen rencana tambahan setoran modal yang akan dilakukan oleh Pemegang Saham sejumlah Rp 4.300.000.000 akan dilaksanakan paling lama tanggal 25 agustus 2024 agar sanksi dari pihak Otoritas dapat segera dicabut terhadap BPR Sindu Adi</li> <li>-Komposisi pengurus yang disepakati saat ini adalah dengan adanya 2 Direksi dan 2 Komisaris</li> <li>-Disepakati bahwa hingga akhir tahun 2024, BPR belum merencanakan melakukan pindah Gedung kantor baru dengan banyak pertimbangan yang harus dipertimbangkan.</li> <li>-Pelaksanaan perubahan layout kantor disesuaikan dengan kebutuhan operasional BPR,diserahkan sepenuhnya kepada direksi untuk segera pelaksanaannya.</li> <li>-Proses persetujuan perubahan nama dari BPR</li> </ul>

			<p>Sindu Adi menjadi BPR Suriah yogyakarta dari DepKumHam sudah diberitahukan bahwa sudah disetujui sehingga saat ini pihak BPR Sindu Adi sedang dalam proses mengajukan persetujuan dari pihak OJK</p> <p>-Dewan komisaris me-reminder tetap diperlukan Refresh APUPPT bagi seluruh karyawan.namun perlu dijajaki kemungkinan penyelenggaraannya bersama dengan BPR lain dalam rangka efesiensi biaya penyelenggaraan.</p>
4.	18 Desember 2024	4	Evaluasi Kinerja BPR
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Rapat yang dilakukan dalam Periode tahun 2024 ini sudah dilakukan sebanyak 4 kali.			

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Dadang Purwanta, SE, MM	4	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Frekuensi kehadiran Komisaris pada pelaksanaan Rapat adalah 4 Kali pertemuan di tahun 2024				

## J. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Tidak ada Penyimpangan Internal yang terjadi pada tahun 2024								

## K. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Tidak ada Permasalahan Hukum yang dihadapi oleh BPR SURIYAH YOGYAKARTA pada tahun 2024		

### K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.									
2.									
3.									
Penjelasan Lebih Lanjut :									
Tidak ada transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan di BPR SURIYAH YOGYAKARTA pada tahun 2024									

### L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	11 Juli 2024	Sosial	Melayat	Sri Tursilowati	Rp200.000
2.	17 Juli 2024	Sosial	HUT RI ke 79 RW 10 Padukuhan, Mraen, Mlati	Ketua RW 10	Rp100.000
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
-					

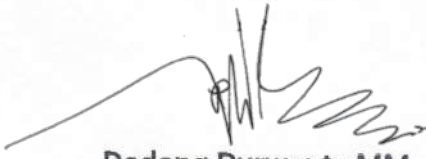
Yogyakarta, 23 Januari 2025

**BPR SURIYAH YOGYAKARTA**

Disetujui Oleh

  
**Sudjut Budi Utomo**  
Direktur Utama

Diketahui Oleh

  
**Dadang Purwanta, MM**  
Komisaris

## KERTAS KERJA LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

### Faktor 1. Aspek Pemegang Saham

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>			
1	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	<b>Telah Terpenuhi</b>	<i>BPR telah mengimplementasikan indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penilaian telah terpenuhi.</i>
2	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<b>Telah Terpenuhi</b>	<i>Indikator Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada BPR saat ini telah terpenuhi.</i>
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>			
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Berdasarkan hasil penilaian, indikator Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada BPR dinilai cukup baik.</i>
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Hasil evaluasi menunjukkan indikator Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, pada BPR berada dalam kondisi cukup baik.</i>
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, BPR tergolong cukup baik.</i>

6	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Hasil evaluasi menunjukkan indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, pada BPR berada dalam kondisi cukup baik.</i>
7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	<b>Baik</b>	<i>BPR telah mengimplementasikan indikator Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham, yang baik.</i>
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>			
8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	<b>Baik</b>	<i>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi, BPR tergolong baik.</i>
9	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya, yang dimiliki BPR dinilai cukup baik.</i>
10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	<b>Baik</b>	<i>Kondisi indikator Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR adalah baik.</i>

11	<p>Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.</p>	<b>Baik</b>	<p><i>BPR memiliki indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, yang dinilai baik.</i></p>
----	--	-------------	---

**Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur**

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	<b>2 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	<b>Terpenuhi Secara Keseluruhan</b>

**Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil**

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	<b>4 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	<b>5 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
<b>Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Cukup Baik</b>
<b>Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Cukup Baik</b>
<b>Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Cukup Baik</b>
<b>Nilai Faktor yang Dipilih:</b>	<b>Nilai 3 (Cukup Memadai)</b>

Kesimpulan Penilaian Faktor 1. Aspek Pemegang Saham	
Nilai Faktor	
Nilai 3 (Cukup Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola cukup memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/ atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Sebagian pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR belum sepenuhnya terealisasikan yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.</p> <p>c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.</p>	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPR telah mengimplementasikan indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penilaian telah terpenuhi.</li> <li>2. Indikator Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada BPR saat ini telah terpenuhi.</li> </ol>
2)	Faktor Negatif
	BPR SURIYAH YOGYAKARTA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada BPR dinilai cukup baik.</li> <li>2. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, pada BPR berada dalam kondisi cukup baik.</li> <li>3. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, BPR</li> </ol>

	<p>tergolong cukup baik.</p> <p>4. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, pada BPR berada dalam kondisi cukup baik.</p> <p>5. BPR telah mengimplementasikan indikator Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham, yang baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	BPR SURIYAH YOGYAKARTA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi, BPR tergolong baik.</p> <p>2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya, yang dimiliki BPR dinilai cukup baik.</p> <p>3. Kondisi indikator Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR adalah baik.</p> <p>4. BPR memiliki indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, yang dinilai baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	BPR SURIYAH YOGYAKARTA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

## Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>			
1	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	<b>Telah Terpenuhi</b>	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Telah Terpenuhi</b>	BPR telah mengimplementasikan indikator Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang telah terpenuhi.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Telah Terpenuhi</b>	Kondisi indikator Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.
4	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Telah Terpenuhi</b>	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian telah terpenuhi.

5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	<b>Sebagian Terpenuhi</b>	<i>Implementasi indikator Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, di BPR menunjukkan kondisi sebagian terpenuhi.</i>
6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit:a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;b. pengorganisasian BPR dan pembedangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	<b>Telah Terpenuhi</b>	<i>Hasil evaluasi menunjukkan indikator Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit:, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.</i>
7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	<b>Telah Terpenuhi</b>	<i>Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, pada BPR dinilai telah terpenuhi.</i>
8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Telah Terpenuhi</b>	<i>Implementasi indikator Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.</i>

9	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	<b>Telah Terpenuhi</b>	<i>Implementasi indikator Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.</i>
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>			
10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	<b>Baik</b>	<i>BPR memiliki indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, yang dinilai baik.</i>
11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Indikator Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, pada BPR indikator Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, dinilai cukup baik.</i>

12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain.	<b>Baik</b>	<i>Implementasi indikator Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain, di BPR menunjukkan kondisi baik.</i>
13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	<b>Baik</b>	<i>Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, pada BPR dinilai baik.</i>
14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	<b>Baik</b>	<i>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, BPR tergolong baik.</i>
15	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	<b>Cukup Baik</b>	<i>BPR telah mengimplementasikan indikator Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, yang cukup baik.</i>

16	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	<b>Baik</b>	<i>Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, yang baik.</i>
17	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	<b>Baik</b>	<i>Berdasarkan hasil penilaian, indikator Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, pada BPR dinilai baik.</i>
18	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	<b>Baik</b>	<i>BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai, yang baik.</i>
19	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/ atau pemegang saham BPR.	<b>Sangat Baik</b>	<i>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi mengungkapkan; dengan pencapaian sangat baik.</i>

20	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	<b>Baik</b>	<i>BPR memiliki indikator Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, indikator Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, yang dinilai baik.</i>
21	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	<b>Baik</b>	<i>Penilaian terhadap indikator Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten, yang dimiliki BPR adalah baik.</i>
22	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, berjalan dengan cukup baik.</i>
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>			
23	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	<b>Baik</b>	<i>Indikator Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, pada BPR saat ini dinilai baik.</i>
24	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	<b>Baik</b>	<i>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR, BPR tergolong baik.</i>
25	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	<b>Baik</b>	<i>Berdasarkan hasil penilaian, indikator Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, pada BPR dinilai baik.</i>

26	<p>Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.</p>	<b>Sangat Baik</b>	<p><i>Indikator Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, pada BPR indikator Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, dinilai sangat baik.</i></p>
27	<p>Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.</p>	<b>Baik</b>	<p><i>Indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, pada BPR indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, dinilai baik.</i></p>
28	<p>Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p>	<b>Sangat Baik</b>	<p><i>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak- pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik.</i></p>

<b>Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur</b>	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	<b>8 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	<b>1 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	<b>Terpenuhi Sebagian</b>
<b>Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil</b>	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	<b>3 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Baik:	<b>13 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	<b>3 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
<b>Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Baik</b>
<b>Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Baik</b>
<b>Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Baik</b>
<b>Nilai Faktor yang Dipilih:</b>	<b>Nilai 3 (Cukup Memadai)</b>

<b>Kesimpulan Penilaian Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi</b>	
<b>Nilai Faktor</b>	
<b>Nilai 3 (Cukup Memadai)</b>	
<b>Penjelasan Nilai Faktor</b>	
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan cukup baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab dan dapat diperbaiki serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan cukup baik.</p> <p>c. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p> <p>d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</p> <p>e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain namun terdapat temuan berulang yang bersifat administratif.</p>	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.</li> <li>2. BPR telah mengimplementasikan indikator Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang telah terpenuhi.</li> <li>3. Kondisi indikator Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.</li> <li>4. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian telah</li> </ol>

	<p>terpenuhi.</p> <p>5. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.</p> <p>6. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, pada BPR dinilai telah terpenuhi.</p> <p>7. Implementasi indikator Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.</p> <p>8. Implementasi indikator Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.</p>
2)	Faktor Negatif
	<p>1. Implementasi indikator Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, di BPR menunjukkan kondisi sebagian terpenuhi.</p>
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	<p>1. BPR memiliki indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, yang dinilai baik.</p> <p>2. Indikator Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, pada BPR indikator Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, dinilai cukup baik.</p> <p>3. Implementasi indikator Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain, di BPR menunjukkan kondisi baik.</p> <p>4. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, pada BPR dinilai baik.</p> <p>5. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, BPR tergolong baik.</p> <p>6. BPR telah mengimplementasikan indikator Kebijakan dan keputusan strategis yang</p>

	<p>diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, yang cukup baik.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, yang baik.</li> <li>8. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, pada BPR dinilai baik.</li> <li>9. BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai, yang baik.</li> <li>10. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi mengungkapkan:, dengan pencapaian sangat baik.</li> <li>11. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, yang dimiliki BPR dinilai cukup baik.</li> <li>12. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten, berjalan dengan cukup baik.</li> <li>13. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, berjalan dengan cukup baik.</li> </ol>
2)	Faktor Negatif
	Nihil
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, BPR tergolong cukup baik.</li> <li>2. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR, BPR tergolong baik.</li> <li>3. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, pada BPR dinilai baik.</li> <li>4. Indikator Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, pada BPR indikator Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, dinilai sangat baik.</li> <li>5. Indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam</li> </ol>

	<p>pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, pada BPR indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, dinilai baik.</p> <p>6. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	Nihil

### Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>			
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Sebagian Terpenuhi</b>	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang sebagian terpenuhi.
2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Telah Terpenuhi</b>	Implementasi indikator Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.
3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	<b>Telah Terpenuhi</b>	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat; yang telah terpenuhi.
4	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Telah Terpenuhi</b>	Indikator Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini telah terpenuhi.
5	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Telah Terpenuhi</b>	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan telah terpenuhi.

6	<p>Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p>	<p><b>Telah Terpenuhi</b></p>	<p>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, BPR tergolong telah terpenuhi.</p>
7	<p>Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.</p>	<p><b>Telah Terpenuhi</b></p>	<p>BPR memiliki indikator Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR, indikator Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR, yang dinilai telah terpenuhi.</p>

8	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	<b>Telah Terpenuhi</b>	<i>Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, yang telah terpenuhi.</i>
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>			
9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS, dengan pencapaian cukup baik.</i>
10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Kondisi indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, yang dimiliki BPR adalah cukup baik.</i>
11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	<b>Baik</b>	<i>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, BPR tergolong baik.</i>

12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	<b>Baik</b>	<i>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, yang dimiliki BPR dinilai baik.</i>
13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR, yang dimiliki BPR dinilai cukup baik.</i>
14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, yang cukup baik.</i>
15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Indikator Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, pada BPR saat ini cukup baik.</i>

16	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	<b>Baik</b>	<i>Indikator Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, pada BPR indikator Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, dinilai baik.</i>
17	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	<b>Sangat Baik</b>	<i>Indikator Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, pada BPR saat ini sangat baik.</i>
18	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	<b>Baik</b>	<i>Indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, pada BPR indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, dinilai baik.</i>

19	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	<b>Cukup Baik</b>	Indikator Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pada BPR saat ini cukup baik.
20	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	<b>Baik</b>	Implementasi indikator Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, di BPR menunjukkan kondisi baik.
21	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	<b>Cukup Baik</b>	Indikator Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pada BPR indikator Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dinilai cukup baik.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>			
22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	<b>Baik</b>	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, dengan pencapaian baik.

23	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	<b>Sangat Baik</b>	<i>BPR memiliki indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, yang dinilai sangat baik.</i>
24	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	<b>Baik</b>	<i>Berdasarkan hasil penilaian, indikator Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, pada BPR dinilai baik.</i>
25	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Implementasi indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, di BPR menunjukkan kondisi cukup baik.</i>
26	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	<b>Baik</b>	<i>Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, berjalan dengan baik.</i>
<b>Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur</b>			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:			0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:			7 Indikator

Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	<b>1 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	<b>Terpenuhi Sebagian</b>
<b>Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil</b>	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	<b>2 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Baik:	<b>8 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	<b>8 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
<b>Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Cukup Baik</b>
<b>Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Baik</b>
<b>Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Baik</b>
<b>Nilai Faktor yang Dipilih:</b>	<b>Nilai 4 (Kurang Memadai)</b>

**Kesimpulan Penilaian Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris**

**Nilai Faktor**

**Nilai 4 (Kurang Memadai)**

**Penjelasan Nilai Faktor**

Memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:

- a. Dewan Komisaris memenuhi sebagian persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan kurang baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.
- b. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris tidak terlaksana dengan baik.
- c. Dewan Komisaris kurang memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga tidak terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.
- d. Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan remunerasi dan nominasi namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas tidak terlaksana dengan baik.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi indikator Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.</li> <li>2. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat:, yang telah terpenuhi.</li> <li>3. Indikator Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini telah terpenuhi.</li> <li>4. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan telah terpenuhi.</li> <li>5. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, BPR tergolong telah terpenuhi.</li> </ol>

	<p>6. BPR memiliki indikator Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR, indikator Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR, yang dinilai telah terpenuhi.</p> <p>7. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, yang telah terpenuhi.</p>
2)	Faktor Negatif
	<p>1. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang sebagian terpenuhi.</p>
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS, dengan pencapaian cukup baik.</li> <li>2. Kondisi indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, yang dimiliki BPR adalah cukup baik.</li> <li>3. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, BPR tergolong baik.</li> <li>4. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, yang dimiliki BPR dinilai baik.</li> <li>5. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR, yang dimiliki BPR dinilai cukup baik.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, yang cukup baik.</li> <li>7. Indikator Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, pada BPR saat ini cukup baik.</li> <li>8. Indikator Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, pada BPR indikator Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, dinilai baik.</li> <li>9. Indikator Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, pada BPR saat ini sangat baik.</li> <li>10. Indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, pada BPR indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, dinilai baik.</li> <li>11. Indikator Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pada BPR saat ini cukup baik.</li> <li>12. Implementasi indikator Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, di BPR menunjukkan kondisi baik.</li> <li>13. Indikator Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pada BPR indikator Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dinilai cukup baik.</li> </ol>
2)	Faktor Negatif
	Nihil
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, dengan pencapaian baik.</li> <li>2. BPR memiliki indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris,</li> </ol>

	<p>indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, yang dinilai sangat baik.</p> <p>3. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, pada BPR dinilai baik.</p> <p>4. Implementasi indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, di BPR menunjukkan kondisi cukup baik.</p> <p>5. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, berjalan dengan baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	Nihil

#### **Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite**

*Tidak ada penilaian untuk faktor ini.*

## Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>			
1	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	<b>Telah Terpenuhi</b>	Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>			
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	<b>Baik</b>	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, berjalan dengan baik.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>			
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	<b>Sangat Baik</b>	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik.

4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	<b>Sangat Baik</b>	<i>Indikator Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik, pada BPR saat ini sangat baik.</i>
5	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	<b>Sangat Baik</b>	<i>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik.</i>
<b>Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur</b>			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		<b>1 Indikator</b>	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		<b>Terpenuhi Secara Keseluruhan</b>	
<b>Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil</b>			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		<b>3 Indikator</b>	
Indikator dengan nilai Baik:		<b>1 Indikator</b>	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		<b>Sangat Baik</b>	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		<b>Sangat Baik</b>	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		<b>Sangat Baik</b>	
Nilai Faktor yang Dipilih:		<b>Nilai 2 (Memadai)</b>	

**Kesimpulan Penilaian Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan**

**Nilai Faktor**

**Nilai 2 (Memadai)**

**Penjelasan Nilai Faktor**

Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:

- a. BPR telah memiliki dan menginisiasi kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup memadai, serta berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik sesuai dengan kebijakan.
- b. Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan dan apabila terdapat benturan kepentingan ditangani dengan baik serta tidak menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, diungkapkan seluruhnya dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan sangat baik.
- c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara baik.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>	
1)	Faktor Positif
	1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	1. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, berjalan dengan baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>	

1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik.</li><li>2. Indikator Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik, pada BPR saat ini sangat baik.</li><li>3. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik.</li></ol>
2)	Faktor Negatif
	Nihil

## Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>			
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Telah Terpenuhi</b>	<i>BPR telah mengimplementasikan indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang telah terpenuhi.</i>
2	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Belum Terpenuhi</b>	<i>Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi belum terpenuhi.</i>
3	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	<b>Belum Terpenuhi</b>	<i>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, dengan pencapaian belum terpenuhi.</i>
4	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	<b>Belum Terpenuhi</b>	<i>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif, yang dimiliki BPR dinilai belum terpenuhi.</i>
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>			

5	<p>Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.</p>	<b>Baik</b>	<p>Indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, pada BPR indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, dinilai baik.</p>
6	<p>Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<b>Baik</b>	<p>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, BPR tergolong baik.</p>
7	<p>Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.</p>	<b>Tidak Baik</b>	<p>Implementasi indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, di BPR menunjukkan kondisi tidak baik.</p>
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>			
8	<p>BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.</p>	<b>Baik</b>	<p>BPR telah mengimplementasikan indikator BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, yang baik.</p>

9	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	<b>Baik</b>	<i>Indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR saat ini baik.</i>
<b>Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur</b>			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		<b>1 Indikator</b>	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		<b>3 Indikator</b>	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		<b>Terpenuhi Sebagian</b>	
<b>Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil</b>			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		<b>4 Indikator</b>	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		<b>1 Indikator</b>	
<b>Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>		<b>Baik</b>	
<b>Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>		<b>Baik</b>	
<b>Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>		<b>Cukup Baik</b>	
<b>Nilai Faktor yang Dipilih:</b>		<b>Nilai 4 (Kurang Memadai)</b>	

**Kesimpulan Penilaian Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan**

**Nilai Faktor**

**Nilai 4 (Kurang Memadai)**

**Penjelasan Nilai Faktor**

Memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:

- a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi sebagian persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada direktur utama dan cukup berhasil menurunkan tingkat pelanggaran.
- b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum mengangkat Pejabat Eksekutif sehingga tidak dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan penerapan prinsip tata kelola cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.
- c. Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan belum memiliki pedoman dan tata tertib kerja dan ruang lingkup tidak sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas tidak terlaksana dengan baik.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>	
1)	Faktor Positif
	1. BPR telah mengimplementasikan indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR belum memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga BPR berada dalam kondisi belum terpenuhi. 2. Dalam upaya pengembangannya, BPR belum memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, tetapi ditangani oleh Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan telah menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, dengan pencapaian pengembangannya belum terpenuhi. 3. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR belum menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif, yang dimiliki BPR dinilai belum terpenuhi.

<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, pada BPR indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, dinilai baik.</p> <p>2. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, BPR tergolong baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	<p>1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, dengan pencapaian tidak baik.</p>
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	<p>1. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, yang baik.</p> <p>2. Indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR saat ini baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	Nihil

## Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>			
1	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Telah Terpenuhi</b>	<i>Implementasi indikator BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.</i>
2	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	<b>Telah Terpenuhi</b>	<i>BPR telah mengimplementasikan indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, yang telah terpenuhi.</i>
3	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	<b>Telah Terpenuhi</b>	<i>Implementasi indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.</i>
4	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	<b>Telah Terpenuhi</b>	<i>Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, yang telah terpenuhi.</i>

5	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	<b>Telah Terpenuhi</b>	<i>Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.</i>
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, berjalan dengan cukup baik.</i>
7	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	<b>Tidak Dinilai</b>	<i>BPR tidak menilai indikator BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern</i>
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Hasil evaluasi menunjukkan indikator Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, pada BPR berada dalam kondisi cukup baik.</i>

9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	<b>Baik</b>	<i>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, yang dimiliki BPR dinilai baik.</i>
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>			
10	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong cukup baik.</i>
11	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dante pat waktu.	<b>Sangat Baik</b>	<i>Indikator BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dante pat waktu, pada BPR indikator BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dante pat waktu, dinilai sangat baik.</i>
<b>Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur</b>			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		<b>5 Indikator</b>	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		<b>Terpenuhi Secara Keseluruhan</b>	
<b>Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil</b>			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		<b>1 Indikator</b>	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		<b>1 Indikator</b>	

Indikator dengan nilai Baik:	<b>1 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	<b>3 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
<b>Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Cukup Baik</b>
<b>Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Cukup Baik</b>
<b>Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Baik</b>
<b>Nilai Faktor yang Dipilih:</b>	<b>Nilai 3 (Cukup Memadai)</b>

### Kesimpulan Penilaian Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern

#### Nilai Faktor

**Nilai 3 (Cukup Memadai)**

#### Penjelasan Nilai Faktor

Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:

- a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
- b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi indikator BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.</li> <li>2. BPR telah mengimplementasikan indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, yang telah terpenuhi.</li> <li>3. Implementasi indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan</li> </ol>

	<p>fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.</p> <p>4. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, yang telah terpenuhi.</p> <p>5. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.</p>
2)	Faktor Negatif
	BPR SURIYAH YOGYAKARTA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, berjalan dengan cukup baik.</p> <p>2. BPR tidak menilai indikator BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern</p> <p>3. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, pada BPR berada dalam kondisi cukup baik.</p> <p>4. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, yang dimiliki BPR dinilai baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	BPR SURIYAH YOGYAKARTA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong cukup baik.</p> <p>2. Indikator BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dantepat waktu, pada BPR indikator BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam</p>

	ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dantepat waktu, dinilai sangat baik.
2)	Faktor Negatif
	BPR SURIYAH YOGYAKARTA mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

## Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>			
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	<b>Telah Terpenuhi</b>	<i>Indikator Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, pada BPR saat ini telah terpenuhi.</i>
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>			
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	<b>Sangat Baik</b>	<i>BPR memiliki indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), yang dinilai sangat baik.</i>

3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	<b>Sangat Baik</b>	<i>Indikator BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, pada BPR indikator BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, dinilai sangat baik.</i>
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>			
4	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	<b>Sangat Baik</b>	<i>Indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, pada BPR indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, dinilai sangat baik.</i>
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Sangat Baik</b>	<i>Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan sangat baik.</i>
<b>Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur</b>			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		<b>1 Indikator</b>	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		<b>Terpenuhi Secara Keseluruhan</b>	
<b>Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil</b>			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		<b>4 Indikator</b>	
Indikator dengan nilai Baik:		0 Indikator	

Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
<b>Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Sangat Baik</b>
<b>Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Sangat Baik</b>
<b>Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Sangat Baik</b>
<b>Nilai Faktor yang Dipilih:</b>	<b>Nilai 1 (Sangat Memadai)</b>

<b>Kesimpulan Penilaian Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern</b>
<b>Nilai Faktor</b>
<b>Nilai 1 (Sangat Memadai)</b>
<b>Penjelasan Nilai Faktor</b>
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang- undangan sehingga hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan management letter disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, serta hasil audit menggambarkan seluruh permasalahan BPR.</p>

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>	
1)	Faktor Positif
	1. Indikator Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, pada BPR saat ini telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	1. BPR memiliki indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk

	<p>Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), yang dinilai sangat baik.</p> <p>2. Indikator BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, pada BPR indikator BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, dinilai sangat baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	Nihil
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, pada BPR indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, dinilai sangat baik.</p> <p>2. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan sangat baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	Nihil

## Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>			
1	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Belum Terpenuhi</b>	Implementasi indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi belum terpenuhi.
2	BPR memiliki dan mengingkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	<b>Belum Terpenuhi</b>	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR memiliki dan mengingkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, yang dimiliki BPR dinilai belum terpenuhi.
3	BPR memiliki dan mengingkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	<b>Telah Terpenuhi</b>	BPR memiliki indikator BPR memiliki dan mengingkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, indikator BPR memiliki dan mengingkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dinilai telah terpenuhi.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>			

4	<p>Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<b>Cukup Baik</b>	<p><i>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong cukup baik.</i></p>
5	<p>Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</p>	<b>Baik</b>	<p><i>Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Direksi; yang baik.</i></p>
6	<p>Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</p>	<b>Baik</b>	<p><i>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dewan Komisaris; BPR tergolong baik.</i></p>

7	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	<b>Baik</b>	Implementasi indikator BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, di BPR menunjukkan kondisi baik.
8	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	<b>Cukup Baik</b>	Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, pada BPR berada dalam kondisi cukup baik.
9	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Baik</b>	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai baik.
10	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Baik</b>	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.
11	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	<b>Baik</b>	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, dengan pencapaian baik.
12	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Cukup Baik</b>	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan cukup baik.

13	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	<b>Sangat Baik</b>	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, BPR tergolong sangat baik.
14	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	<b>Baik</b>	Implementasi indikator Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, di BPR menunjukkan kondisi baik.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>			
15	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	<b>Sangat Baik</b>	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, BPR tergolong sangat baik.
16	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Sangat Baik</b>	Indikator BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini sangat baik.
17	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	<b>Sangat Baik</b>	Implementasi indikator BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, di BPR menunjukkan kondisi sangat baik.
<b>Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur</b>			

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	<b>1 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	<b>2 Indikator</b>
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	<b>Terpenuhi Sebagian</b>
<b>Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil</b>	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	<b>4 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Baik:	<b>7 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	<b>3 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
<b>Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Baik</b>
<b>Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Baik</b>
<b>Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Baik</b>
<b>Nilai Faktor yang Dipilih:</b>	<b>Nilai 4 (Kurang Memadai)</b>

Kesimpulan Penilaian Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	
Nilai Faktor	
Nilai 4 (Kurang Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
<p>Memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR memenuhi sebagian persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan kurang baik sehingga: 1) peringkat risiko tinggi; 2) terdapat fraud; dan/atau 3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme tinggi.</p> <p>b. BPR telah memiliki pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup kurang memadai, dan penerapan manajemen risiko kurang memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut.</p> <p>c. Sebagian kecil pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian kecil jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.</p>	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>	
1)	Faktor Positif
	1. BPR memiliki indikator BPR memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, indikator BPR memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	<p>1. Implementasi indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi belum terpenuhi.</p> <p>2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR memiliki dan menginginkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, yang dimiliki BPR dinilai belum</p>

	terpenuhi.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong cukup baik.</li> <li>2. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Direksi:, yang baik.</li> <li>3. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dewan Komisaris:, BPR tergolong baik.</li> <li>4. Implementasi indikator BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, di BPR menunjukkan kondisi baik.</li> <li>5. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, pada BPR berada dalam kondisi cukup baik.</li> <li>6. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai baik.</li> <li>7. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.</li> <li>8. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, dengan pencapaian baik.</li> <li>9. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan cukup baik.</li> <li>10. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, BPR tergolong sangat baik.</li> <li>11. Implementasi indikator Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, di BPR menunjukkan kondisi baik.</li> </ol>
2)	Faktor Negatif
	Nihil
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas</li> </ol>

	<p>Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, BPR tergolong sangat baik.</p> <p>2. Indikator BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini sangat baik.</p> <p>3. Implementasi indikator BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, di BPR menunjukkan kondisi sangat baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	Nihil

## Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	<b>Telah Terpenuhi</b>	<i>Kondisi indikator BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.</i>
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	<b>Baik</b>	<i>BPR memiliki indikator BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, indikator BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, yang dinilai baik.</i>
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	<b>Sangat Baik</b>	<i>Berdasarkan hasil penilaian, indikator Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, pada BPR dinilai sangat baik.</i>
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>			

4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Sangat Baik</b>	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai sangat baik.
5	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Sangat Baik</b>	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik.
<b>Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur</b>			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		<b>Terpenuhi Secara Keseluruhan</b>	
<b>Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil</b>			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		<b>Sangat Baik</b>	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		<b>Sangat Baik</b>	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		<b>Sangat Baik</b>	
Nilai Faktor yang Dipilih:		<b>Nilai 2 (Memadai)</b>	

**Kesimpulan Penilaian Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit**

**Nilai Faktor**

**Nilai 2 (Memadai)**

**Penjelasan Nilai Faktor**

Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:

- a. BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR.
- b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar sebagian besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang- undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/ atau pelampauan BMPK dilakukan dengan segera.
- c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>	
1)	Faktor Positif
	1. Kondisi indikator BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	1. BPR memiliki indikator BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan, indikator BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan, yang dinilai baik. 2. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai

	BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, pada BPR dinilai sangat baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai sangat baik.</p> <p>2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	Nihil

## Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	<b>Sebagian Terpenuhi</b>	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang sebagian terpenuhi.
2	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	<b>Telah Terpenuhi</b>	BPR memiliki indikator BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, indikator BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, yang dinilai telah terpenuhi.
3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	<b>Telah Terpenuhi</b>	Implementasi indikator BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>			

4	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang dimiliki BPR dinilai cukup baik.</i>
5	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Sangat Baik</b>	<i>Indikator BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai sangat baik.</i>
6	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Sangat Baik</b>	<i>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong sangat baik.</i>

7	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Sangat Baik</b>	<i>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian sangat baik.</i>
8	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Sangat Baik</b>	<i>BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang sangat baik.</i>
9	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	<b>Sangat Baik</b>	<i>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, dengan pencapaian sangat baik.</i>
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>			
10	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	<b>Baik</b>	<i>Berdasarkan hasil penilaian, indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, pada BPR dinilai baik.</i>

11	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Sangat Baik</b>	<i>BPR memiliki indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai sangat baik.</i>
12	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	<b>Cukup Baik</b>	<i>Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, berjalan dengan cukup baik.</i>

**Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur**

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	<b>2 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	<b>1 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	<b>Terpenuhi Sebagian</b>

**Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil**

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	<b>6 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Baik:	<b>1 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	<b>2 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator

Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Sangat Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Sangat Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 4 (Kurang Memadai)

<b>Kesimpulan Penilaian Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi</b>
<b>Nilai Faktor</b>
<b>Nilai 4 (Kurang Memadai)</b>
<b>Penjelasan Nilai Faktor</b>
<p>Memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang kurang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan tidak sepenuhnya dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.</p> <p>b. BPR belum sepenuhnya memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan belum dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.</p> <p>c. BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup kurang memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan kurang sesuai dengan kebijakan dan prosedur.</p> <p>d. BPR belum sepenuhnya melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sehingga terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang bersifat signifikan dan tidak ditindaklanjuti segera.</p>

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>	
1)	Faktor Positif
	<p>1. BPR memiliki indikator BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, indikator BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh</p>

	<p>Dewan Komisaris, yang dinilai telah terpenuhi.</p> <p>2. Implementasi indikator BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.</p>
2)	Faktor Negatif
	<p>1. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang sebagian terpenuhi.</p>
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang dimiliki BPR dinilai cukup baik.</p> <p>2. Indikator BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai sangat baik.</p> <p>3. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong sangat baik.</p> <p>4. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian sangat baik.</p> <p>5. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang sangat baik.</p> <p>6. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, dengan pencapaian sangat baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	Nihil
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>	

1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, pada BPR dinilai baik.</li><li>2. BPR memiliki indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai sangat baik.</li><li>3. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, berjalan dengan cukup baik.</li></ol>
2)	Faktor Negatif
	Nihil

## Faktor 12. Rencana Bisnis BPR

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>			
1	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	<b>Telah Terpenuhi</b>	Indikator Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, pada BPR saat ini telah terpenuhi.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Telah Terpenuhi</b>	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong telah terpenuhi.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	<b>Telah Terpenuhi</b>	BPR telah mengimplementasikan indikator Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, yang telah terpenuhi.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>			
4	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	<b>Baik</b>	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit; pada BPR berada dalam kondisi baik.

5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	<b>Baik</b>	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR, BPR tergolong baik.
---	--	-------------	--

### C. Hasil Penerapan Tata Kelola

6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Sangat Baik</b>	Indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini sangat baik.
7	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	<b>Baik</b>	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, berjalan dengan baik.

### Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	<b>3 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	<b>Terpenuhi Secara Keseluruhan</b>

### Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	<b>1 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Baik:	<b>3 Indikator</b>
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
<b>Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Baik</b>
<b>Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:</b>	<b>Baik</b>

Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

<b>Kesimpulan Penilaian Faktor 12. Rencana Bisnis BPR</b>
<b>Nilai Faktor</b>
<b>Nilai 2 (Memadai)</b>
<b>Penjelasan Nilai Faktor</b>
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p> <p>b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan sebagian besar komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.</p>

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
<b>A. Struktur dan Infrastruktur</b>	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indikator Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, pada BPR saat ini telah terpenuhi.</li> <li>2. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong telah terpenuhi.</li> <li>3. BPR telah mengimplementasikan indikator Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, yang telah terpenuhi.</li> </ol>
2)	Faktor Negatif
	Nihil
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>	

1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit:, pada BPR berada dalam kondisi baik.</li> <li>2. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR, BPR tergolong baik.</li> </ol>
2)	Faktor Negatif
	Nihil
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola</b>	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini sangat baik.</li> <li>2. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, berjalan dengan baik.</li> </ol>
2)	Faktor Negatif
	Nihil

## Kesimpulan Akhir

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	Nilai 3 (Cukup Memadai)
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	Nilai 3 (Cukup Memadai)
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	Nilai 4 (Kurang Memadai)
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Tidak Dinilai
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Nilai 2 (Memadai)
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Nilai 4 (Kurang Memadai)
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	Nilai 3 (Cukup Memadai)
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Nilai 1 (Sangat Memadai)
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	Nilai 4 (Kurang Memadai)
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Nilai 2 (Memadai)
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	Nilai 4 (Kurang Memadai)
12	Rencana Bisnis BPR	Nilai 2 (Memadai)
<b>Modus Nilai Faktor</b>		<b>Nilai 4</b>
<b>Median Nilai Faktor</b>		<b>Nilai 3</b>
<b>Rata-rata Nilai Faktor</b>		<b>Nilai 3</b>
<b>Peringkat Komposit</b>		<b>4</b>
<b>Predikat Komposit</b>		<b>Kurang Baik</b>

Kesimpulan
Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip tata kelola. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh pemegang saham dan manajemen BPR.
Faktor Positif
<b>A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur</b>
1. BPR memiliki struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham yang dinilai terpenuhi secara keseluruhan.

2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan dengan pencapaian terpenuhi secara keseluruhan.
3. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern yang terpenuhi secara keseluruhan.
4. Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang dimiliki BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
5. Struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR saat ini terpenuhi secara keseluruhan.
6. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR pada BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.

#### **B. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola**

1. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham yang cukup memadai.
2. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang dimiliki BPR dinilai cukup memadai.
3. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris yang cukup memadai.
4. Proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan pada BPR saat ini memadai.
5. Kondisi proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan yang dimiliki BPR adalah cukup memadai.
6. Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern pada BPR berada dalam kondisi memadai.
7. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang sangat memadai.
8. Proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud pada BPR proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud dinilai cukup memadai.
9. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit yang memadai.
10. BPR memiliki proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi yang dinilai memadai.
11. Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR pada BPR dinilai memadai.

#### **C. Faktor Positif Hasil Penerapan Tata Kelola**

1. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham yang dimiliki BPR dinilai cukup memadai.
2. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang memadai.
3. Hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR saat ini memadai.

4. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan yang sangat memadai.
5. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR dinilai memadai.
6. Manajemen BPR telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern berjalan dengan cukup memadai.
7. BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang dinilai sangat memadai.
8. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang sangat memadai.
9. Kondisi hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit yang dimiliki BPR adalah sangat memadai.
10. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi yang cukup memadai.
11. Implementasi hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR di BPR menunjukkan kondisi memadai.

#### Faktor Negatif

##### A. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur

1. Implementasi struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi di BPR menunjukkan kondisi masih terpenuhi sebagian.
2. Implementasi struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris di BPR menunjukkan kondisi masih terpenuhi sebagian.
3. Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR berada dalam kondisi masih terpenuhi sebagian.
4. Kondisi struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang dimiliki BPR adalah masih terpenuhi sebagian.
5. Kondisi struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi yang dimiliki BPR adalah masih terpenuhi sebagian.

##### B. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola

1. Implementasi proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan, yaitu Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan. , di BPR menunjukkan kondisi masih kurang memadai.

##### C. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola

Nihil

## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

Nama BPR : BPR SURIYAH YOGYAKARTA  
Alamat : Jl.Magelang Km.6,3 Jombor Mlati Sleman  
Nomor Telepon : (0274)4362282  
Posisi Laporan : Tahun 2024  
Modal Inti : Rp6.120.345.213  
Total Aset : Rp11.949.081.496

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	Nilai 3 (Cukup Memadai)
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	Nilai 3 (Cukup Memadai)
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	Nilai 4 (Kurang Memadai)
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Tidak Dinilai
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Nilai 2 (Memadai)
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Nilai 4 (Kurang Memadai)
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	Nilai 3 (Cukup Memadai)
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Nilai 1 (Sangat Memadai)
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	Nilai 4 (Kurang Memadai)
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Nilai 2 (Memadai)
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	Nilai 4 (Kurang Memadai)
12	Rencana Bisnis BPR	Nilai 2 (Memadai)
<b>Peringkat Komposit</b>		<b>4</b>
<b>Predikat Komposit</b>		<b>Kurang Baik</b>

## Kesimpulan

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip tata kelola. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh pemegang saham dan manajemen BPR.

## Faktor Positif

### A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur

1. BPR memiliki struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham yang dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan dengan pencapaian terpenuhi secara keseluruhan.
3. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern yang terpenuhi secara keseluruhan.
4. Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang dimiliki BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
5. Struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR saat ini terpenuhi secara keseluruhan.
6. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR pada BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.

### B. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola

1. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham yang cukup memadai.
2. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang dimiliki BPR dinilai cukup memadai.
3. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris yang cukup memadai.
4. Proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan pada BPR saat ini memadai.
5. Kondisi proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan yang dimiliki BPR adalah cukup memadai.
6. Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern pada BPR berada dalam kondisi memadai.
7. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang sangat memadai.
8. Proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud pada BPR proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud dinilai cukup memadai.
9. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit yang memadai.

10. BPR memiliki proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi yang dinilai memadai.
11. Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR pada BPR dinilai memadai.

### **C. Faktor Positif Hasil Penerapan Tata Kelola**

1. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham yang dimiliki BPR dinilai cukup memadai.
2. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang memadai.
3. Hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR saat ini memadai.
4. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan yang sangat memadai.
5. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR dinilai memadai.
6. Manajemen BPR telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern berjalan dengan cukup memadai.
7. BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang dinilai sangat memadai.
8. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang sangat memadai.
9. Kondisi hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit yang dimiliki BPR adalah sangat memadai.
10. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi yang cukup memadai.
11. Implementasi hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR di BPR menunjukkan kondisi memadai.

### **Faktor Negatif**

#### **A. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur**

1. Implementasi struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi di BPR menunjukkan kondisi masih terpenuhi sebagian.
2. Implementasi struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris di BPR menunjukkan kondisi masih terpenuhi sebagian.
3. Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR berada dalam kondisi masih terpenuhi sebagian.
4. Kondisi struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang dimiliki BPR adalah masih terpenuhi sebagian.
5. Kondisi struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi yang

dimiliki BPR adalah masih terpenuhi sebagian.

**B. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola**

1. Implementasi proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan, yaitu Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan. , di BPR menunjukkan kondisi masih kurang memadai.

**C. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola**

Nihil

Yogyakarta, 23 Januari 2025

**BPR SURIYAH YOGYAKARTA**

Disetujui Oleh

  
  
**Sudjut Budi Utomo**  
Direktur Utama

Diketahui Oleh



**Dadang Purwanta, S.E, M.M**

Komisaris